



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.26/M.PPN/HK/02/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL
TATA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu dilakukan pengembangan kebijakan nasional tata pemerintahan yang baik dan mendukung upaya peningkatan praktik penerapan tata pemerintahan yang baik, serta masih perlu dilakukan koordinasi strategis, fasilitasi dan sosialisasi yang terkait dengan penerapan tata pemerintahan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL TATA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, untuk selanjutnya disebut Tim PKNTKB, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim PKNTKB terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pengarah.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
a. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim;
b. mensosialisasikan dan memfasilitasi pengukuran penerapan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance Index/GGI*) di instansi pemerintah;
c. menampung masukan dari instansi terkait sebagai bahan penyempurnaan pengukuran penerapan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance Index/GGI*);
d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan untuk mendukung Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik;

e. melakukan ...

- e. melakukan pertemuan dengan mitra kerja kegiatan pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik;
- f. melakukan penyiapan berbagai bahan/materi yang terkait dengan Tata Pemerintahan yang Baik, khususnya untuk sektor publik;
- g. melakukan penghimpunan serta pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan tata pemerintahan yang baik, khususnya untuk sektor publik;
- h. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik untuk menjadi bahan dalam menyusun perencanaan bidang Tata Pemerintahan.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim PKNTKB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2013.

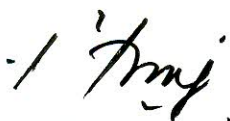
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.26/M.PPN/HK/02/2013
TANGGAL 28 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL
TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
2. Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Hubungan Kelembagaan.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Dr. Raden Siliwanti, MPIA.
- Sekretaris : Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA.
- Anggota : 1. Kurniawan Ariadi, S.IP, M.Com (Koordinator);
2. Agus Sudrajat, S.Sos, MA (Wakil Koordinator);
3. Drs. Setia Budi, MA;
4. Dr. Dadang Solihin, SE., MA;
5. Ir. Juari Sutrisno, ME;
6. Ir. Rinella Tambunan, MPA;
7. Drs. Bustang, M.Si;
8. Nur Syarifah, SH, LL.M;
9. Ir. Agus Sutiadi, M.Si;
10. Abdul Hakim, S.Sos, M.Si;
11. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA;
12. Dia Firdaus, SE, ME;
13. Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si;
14. Yunes Herawati, S.Sos, MIDS;
15. Dyah Widiastuti, S.IP, M.Sc;
16. Astuti Budiati, SE.

D. TENAGA ...

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. M. Kamin Firdaus;
2. Bekti Subekti, SS;
3. Rubiyanto.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun